JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS
Jurnal Program Studi Akuntansi

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jurnalakundandbisnis>

**Indeks Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah:
Bagaimana Perkembangannya?**

***Regional Budget Management Transparency Index:
How is it Progressing?***

Nulailah & Syamsul*

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Panca Bhakti Palu, Indonesia

Diterima: 16 Juni 2021 Direview: 16 Juni 2021 Disetujui: 29 September 2021

*Corresponding Email: svamsulsvahrir@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menakar transparansi pengelolaan anggaran daerah (TPAD). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Data yang dianalisis adalah data pengelolaan anggaran daerah, yang diperoleh melalui pengamatan pada website resmi pemerintah daerah di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan peringkat pertama indeks TPAD diraih oleh Pemprov Sumatera Barat, peringkat kedua ditempati oleh Pemprov Riau, dan peringkat ketiga diduduki oleh Pemprov Kalimantan Selatan. Selain itu, ditemukan juga bahwa nilai rata-rata indeks TPAD sebesar 24,24 persen. Artinya, secara keseluruhan kadar TPAD masih termasuk dalam kualifikasi tidak cukup (*insufficient*), dengan kata lain pengelolaan anggaran daerah di Indonesia masih sangat tidak transparan. Meskipun demikian, penelitian ini juga memperlihatkan bahwa indeks TPAD di Indonesia terus membaik dari tahun ke tahun.

Kata Kunci: transparansi; anggaran daerah; aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi

Abstract

The purpose of this research is to measure the transparency of regional budget management (TPAD). This type of research is descriptive research, using documentation data collection techniques. The data analyzed is regional budget management data, which is obtained through observations on the official website of local governments in Indonesia. The results of the analysis show that the first rank of the TPAD index was achieved by the Provincial Government of West Sumatra, the second rank was occupied by the Provincial Government of Riau, and the third rank was occupied by the Provincial Government of South Kalimantan. In addition, it was also found that the average value of the TPAD index was 24.24 percent. This means that the overall level of TPAD is still classified as insufficient, in other words, the management of regional budgets in Indonesia is still very non-transparent. However, this study also shows that the TPAD index in Indonesia continues to improve from year to year.

Keywords: transparency; local budget; anti-corruption action

How to Cite: Nulailah & Syamsul (2021). Indeks Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah: Bagaimana Perkembangannya? *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 7(2), 180-195.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi pada tataran pemerintah daerah, ditetapkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres RI) Nomor 7 Tahun 2015. Secara khusus, pada poin 32 setiap pemerintah daerah untuk melaksanakan aksi peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah (TPAD) melalui website resmi mereka. Instruksi ini, kembali mempertegas beberapa regulasi sebelumnya tentang pentingnya penerapan TPAD (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.52/1797/SJ/2012). Intinya, pada tataran regulasi yang ada telah mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengedepankan prinsip transparansi demi terbentuknya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Meskipun demikian, berdasarkan data yang diakses dari laman *website* KPK pada tanggal 03 Oktober 2020 memperlihatkan bahwa kasus korupsi yang tindak KPK berdasarkan wilayahnya pada tahun 2004-2020 sebanyak 1075, tertinggi di wilayah pemerintah pusat sebanyak 336 kasus, diikuti Pulau Jawa 330 kasus, kemudian Pulau Sumatera 244 kasus (KPK, 2020). Kemudian, Egi Primayogo selaku peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), menyampaikan hasil observasi mereka terhadap kasus korupsi di Indonesia, bahwa dalam kurun waktu 14 tahun dari 2004 sampai 2018 sebanyak 104 kepala daerah tersangkut skandal korupsi, angka tertinggi tahun 2018 sebanyak 14 perkara (Habibie, 2018). Disisi lain, Pusparisa menyebutkan berdasarkan data yang dipublikasi KPK, bahwa dari tahun 2004 hingga 2019 sebanyak 114 kepala daerah terbentur persoalan korupsi, yaitu sebanyak 17 Gubernur, 23 Wali Kota, dan 74 Bupati (Pusparisa, 2019). Selain itu, Agus Sutarjo selaku ketua KPK mengungkapkan bahwa dari 34 provinsi di Indonesia, sebanyak 22 kepala daerahnya tersandung kasus korupsi (Nugraha, 2019). Intinya, angka ini menginformasikan bahwa kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah di Indonesia masih sangat tinggi.

Selanjutnya, hasil penelitian Alwahidi and Darwanis (2019) pada 224 kabupaten/kota di Indonesia, menunjukkan tingkat TPAD pemerintah kabupaten/kota melalui website resmi mereka sebesar 10,85 persen. Kemudian, Nuryani and Firmansyah (2020) menemukan tingkat transparansi keuangan pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa sebesar 24,76. Adriana and Ritonga (2018) menjelaskan tingkat TPAD pemerintah kabupaten di Pulau Jawa sebesar 19,59 persen. Begitupula, Syamsul and Ritonga (2017) menunjukkan bahwa tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah pemerintah provinsi (Pemprov) sebesar 17,24 persen. Begitupula, Syamsul (2020) menunjukkan rerata indeks TPAD di Indonesia, sebesar 24,36 persen. Sederhananya, temuan penelitian tersebut menginformasikan bahwa tingkat TPAD di Indonesia masih rendah, dapat dikatakan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dilaksanakan secara tidak transparan.

Sayangnya, penelitian yang ada belum mempertimbangkan kriteria kelengkapan informasi (dokumen) yang diungkapkan oleh pemerintah daerah pada website mereka. Padahal, kriteria ini penting untuk dijadikan acuan dalam menilai kualitas (kebermanfaatan) sebuah informasi yang disajikan. Singkatnya, meskipun informasi pengelolaan keuangan daerah itu tersedia, dapat diakses, dan tepat waktu disajikan, tetapi tidak lengkap, tentunya berimplikasi pada tidak efektifnya dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, mayoritas penelitian sebelumnya dalam mengukur tingkat transparansi pemerintah, hanya terbatas pada satu tahun anggaran. Sehingga, tidak menunjukkan informasi tentang perkembangan transparansi pemerintah dari tahun ke tahun, apakah membaik atau malah sebaliknya, semakin memburuk? Penelitian ini hadir untuk melengkapi penelitian sebelumnya, dengan memasukkan kriteria kelengkapan

publikasi dalam menilai indeks TPAD, sehingga tidak hanya kuantitas semata, tetapi kualitas dari sebuah informasi juga dipertimbangkan. Disisi lain, penelitian ini menggambarkan tingkat keberhasilan aksi peningkatan TPAD Indonesia yang lebih akurat, lengkap, dan terkini. Sehingga, lebih dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan, dalam mengevaluasi capaian pelaksanaan TPAD sekarang ini.

Meijer (2013) menyatakan bahwa transparansi adalah sebagai bentuk ketersediaan informasi tentang pelaku pertama yang memungkinkan pelaku kedua menilai aktivitas atau kinerja pelaku pertama. Senada dengan itu, Hoa and Garcia (2017) juga berpendapat bahwa transparansi adalah bentuk kelapangan pengguna kebijakan untuk mendapatkan saluran informasi, dan informasi itu dipublikasikan menggunakan sarana publik atau dengan cara lain. Baur dan Grimes (2012) berpendapat bahwa transparansi adalah ketersediaan, dan kemudahan bagi para aktor, baik internal maupun eksternal untuk mengakses dan menyebarkan informasi yang relevan untuk dievaluasi, baik dalam hal aturan, proses maupun capaiannya. Esteves de Araujo and Tejedo-Romero (2016) mengungkapkan bahwa transparansi merupakan rancangan yang ekstensif berkaitan dengan keberadaan informasi, aksesibilitas, dan kebermanfaatannya kepada warga (publik). Kaufmann & Kraay (2002) mendefinisikan transparansi sebagai peningkatan arus informasi ekonomi, sosial dan politik yang tepat waktu, dapat diandalkan, dan dapat diakses oleh semua pihak yang relevan. Oleh karena itu, transparansi adalah tersedianya informasi tentang lembaga pemerintah yang membolehkan masyarakat untuk memperhatikan dan mengevaluasi kinerja organisasi pemerintah (Grimmelikhuijsen, 2012; A. Meijer, 2013), yang diungkapkan tepat waktu (Ritonga & Syamsul, 2016; Syamsul, 2020; Syamsul & Ritonga, 2017), dan disajikan dengan lengkap (menyeluruh).

Menurut Puron-Cid et al., (2019) transparansi adalah sebuah solusi dalam mereduksi kemungkinan terjadinya kasus korupsi, mendorong kinerja keuangan, dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Transparansi juga dimaknai dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan menguatkan demokrasi (A. J. Meijer et al., 2012; Wei Wu, Liang Ma, 2017). Selanjutnya, Laswad et al., (2005) mengatakan bahwa publikasi laporan keuangan di internet adalah bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Saat ini, menurut Styles & Tennyson (2007) bahwa internet merupakan media yang paling mudah dijangkau oleh publik dan yang paling *cost effective* bagi pemerintah untuk memberikan informasi kepada semua pihak.

Transparansi telah menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah di Indonesia semenjak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik. Undang-undang ini, kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Kemudian, penerapannya Menteri Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.52/1797/37/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Dikuatkan dengan munculnya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi dan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Sebagai tindak lanjut, Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran No. 900/1843/Keuda/IX/2015 Perihal TPAD. Beberapa regulasi dan kebijakan tersebut, memperjelas komitmen pemerintah untuk memperbaiki transparansi, utamanya menguatkan pentingnya peningkatan TPAD (Syamsul, 2020).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metoda *content analysis* (analisis isi). Menurut Moleong (2013) kajian isi adalah penggunaan teknik apapun dalam menarik kesimpulan dengan usaha menemukan karakteristik informasi yang dilakukan secara objektif dan sistematis. Penelitian ini menganalisis isi informasi yang disampaikan lewat website resmi pemerintah daerah (34 Provinsi) di Indonesia. Penelusuran informasi pada website pemerintah daerah dilakukan pada Bulan Mei-Juni 2021. Informasi yang telusuri adalah informasi peningkatan TPAD, yang terdiri dari 12 (dua belas) indikator, sesuai dengan yang tertera dalam Inpres RI Nomor 7 Tahun 2015 (lihat lampiran). Penilaian indikator TPAD didasarkan pada kriteria informasi ditetapkan oleh (Ritonga & Syamsul, 2016), yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu, dengan menambahkan kriteria kelengkapan publikasi sesuai arahan dari penelitian (Syamsul, 2020).

Perhitungan indeks TPAD, yaitu pengukuran menggunakan skor dikotomi, jika suatu indikator TPAD tersedia, dapat diakses, tepat waktu, lengkap dipublikasikan pada website pemerintah daerah diberi nilai masing-masing 1 untuk setiap kriteria dan jika sebaliknya diberi nilai masing-masing 0 untuk setiap kriteria. Skor yang diperoleh untuk setiap kriteria masing-masing dikalikan 0,25. Hasilnya, kemudian dijumlahkan untuk memperoleh skor total untuk setiap indikator. Skor yang diperoleh setiap indikator dijumlahkan untuk mendapatkan skor total untuk setiap pemerintah daerah. Terakhir, menghitung indeks TPAD dengan cara membagi total skor yang diperoleh dengan total skor yang diharapkan dapat diperoleh oleh setiap pemerintah daerah, kemudian dikalikan seratus. Selanjutnya, menghitung tingkat perkembangan indeks TPAD dari periode ke periode. Selain itu, juga dilakukan pengelompokan dengan melihat nilai rata-rata indeks TPAD berdasarkan tingkat keterbukaan anggaran yang dikeluarkan oleh *International Budget Partnership* (IBP) Tahun 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menakar kadar keberhasilan peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah (TPAD), yang secara khusus dituangkan di dalam Inpres RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berdasarkan pada tabel 1, terlihat bahwa indeks TPAD tahun 2016 tertinggi ditempati oleh Pemprov Kalimantan Selatan, disusul Pemprov Sumatera Barat dan Pemprov Riau. Kemudian, nilai indeks TPAD terendah diduduki oleh 16 pemerintah daerah, yaitu Pemprov Sumatera Utara, Bengkulu, DI Yogyakarta, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Banten, Maluku, Gorontalo, Bali, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Papua Barat, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016 mayoritas pemerintah daerah di Indonesia tidak mempublikasikan informasi pengelolaan anggaran daerah pada website mereka. Selain itu, apabila dilihat dari nilai rata-rata indeks TPAD pada tahun 2016 sebesar 19,36 persen. Angka ini, menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran daerah pada tahun 2016 termasuk dalam kualifikasi sangat tidak transparan (Adiloglu & Vuran, 2012).

Selanjutnya, pada tabel 1 indikator TPAD yang paling banyak dipenuhi oleh pemerintah daerah pada tahun 2016 adalah informasi tentang Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan informasi tentang Ringkasan DPA-SKPD. Disisi lain, indikator TPAD yang paling sedikit dipenuhi yaitu informasi tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Artinya, sebagian besar pemerintah daerah belum

mempublikasikan informasi pengelolaan anggaran daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD pada website mereka.

Tabel 1. Indeks Transparansi Pengelolaan Anggaran (TPAD) Tahun 2016

Pemprov	Indikator TPAD Tahun 2016												Total	Indeks
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Aceh	0,5	-	-	0,8	-	-	0,5	-	0,5	-	0,8	-	3,00	25,00
Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Sumatera Barat	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	9,00	75,00
Riau	0,8	0,8	0,5	0,8	0,8	0,8	1,0	0,8	0,5	0,8	0,8	1,0	9,00	75,00
Jambi	0,8	-	-	0,5	-	-	-	-	0,8	0,8	0,5	0,8	4,00	33,33
Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-	0,75	6,25
Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Lampung	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-	-	0,3	1,50	12,50
Bangka Belitung	0,8	0,8	-	-	-	0,8	0,8	-	0,8	0,8	-	-	4,50	37,50
Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,00	8,33
Jawa Barat	-	-	-	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	-	-	0,8	0,8	6,25	52,08
Jawa Tengah	-	-	-	1,0	-	1,0	1,0	1,0	-	-	0,8	-	4,75	39,58
DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Jawa Timur	0,5	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	1,0	7,25	60,42
Kalimantan Barat	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	3,00	25,00
Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Kalimantan Selatan	1,0	-	0,5	1,0	0,8	0,5	1,0	0,8	-	-	-	4,0	9,50	79,17
Kalimantan Timur	1,0	1,0	-	1,0	0,8	0,5	1,0	1,0	-	-	1,0	0,8	8,00	66,67
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	0,5	0,8	0,8	-	-	-	-	2,00	16,67
Nusa Tenggara Timur	0,8	0,8	0,5	0,5	-	-	0,8	0,8	-	-	-	-	4,00	33,33
Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Papua	-	-	-	0,8	-	0,8	-	-	-	-	-	-	1,50	12,50
Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Rerata	0,23	0,13	0,09	0,26	0,14	0,22	0,29	0,22	0,11	0,13	0,19	0,3	2,324	19,363

Sumber: Data primer diolah, 2021

Tabel 2 menunjukkan indeks TPAD tahun 2017. Pada tabel tersebut, tercatat bahwa indeks TPAD tertinggi diraih oleh Pemprov Sumatera Barat dan Pemprov Riau. Kemudian, indeks TPAD terendah dipegang oleh Pemprov Sumatera Utara, Bengkulu, DI Yogyakarta, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Bali, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Singkatnya, mayoritas pemerintah daerah tidak mempublikasikan informasi pengelolaan anggaran daerah tahun 2017 pada website mereka. Adapun, nilai rata-rata indeks TPAD tahun 2017 adalah 20,65 persen, artinya tingkat TPAD masih terbilang sangat tidak transparan (Adiloglu & Vuran, 2012).

Bahkan, tabel 2 pula menjelaskan indikator TPAD yang paling banyak dipenuhi pemerintah daerah yaitu informasi Ringkasan DPA-SKPD, dan disusul informasi Peraturan

Daerah tentang APBD. Sedangkan, indikator TPAD yang paling sedikit dipenuhi oleh pemerintah daerah yaitu informasi tentang LRA-PPKD dan informasi tentang LRA-SKPD. Maknanya, mayoritas pemerintah daerah tidak menyediakan informasi pengelolaan anggaran daerah tentang LRA-SKPD maupun LRA-PPKD pada website mereka.

Tabel 2. Indeks Transparansi Pengelolaan Anggaran (TPAD) Tahun 2017

Nama Pemprov	Indikator TPAD Tahun 2017												Total	Indeks
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Aceh	0,5	0,8	0,8	0,8	-	-	0,5	-	0,5	-	0,8	0,8	5,25	43,75
Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Sumatera Barat	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	9,00	75,00
Riau	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0	0,5	0,8	0,5	0,8	9,00	75,00
Jambi	0,8	-	-	0,5	-	-	0,8	-	-	0,8	0,5	0,8	4,00	33,33
Sumatera Selatan	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,50	12,50
Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Lampung	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	4,17
Bangka Belitung	0,8	0,8	-	-	-	0,8	0,8	-	-	-	-	-	3,00	25,00
Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Banten	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-	0,75	6,25
DKI Jakarta	-	-	-	0,5	-	0,8	-	-	-	-	1,0	-	2,25	18,75
Jawa Barat	-	-	0,8	0,8	0,8	-	1,0	1,0	-	-	1,0	0,5	5,75	47,92
Jawa Tengah	0,8	0,8	1,0	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-	-	-	6,50	54,17
DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Jawa Timur	0,5	0,5	0,8	1,0	0,5	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,8	7,00	58,33
Kalimantan Barat	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	1,75	14,58
Kalimantan Tengah	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-	-	-	-	3,75	31,25
Kalimantan Selatan	0,8	0,8	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	0,8	1,0	8,75	72,92
Kalimantan Timur	0,8	0,8	-	0,8	-	0,8	1,0	1,0	-	-	0,8	0,8	6,50	54,17
Kalimantan Utara	-	-	-	0,3	-	0,3	0,3	-	-	-	-	-	0,75	6,25
Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	0,8	1,0	1,0	-	0,5	-	-	3,25	27,08
Nusa Tenggara Timur	0,8	0,8	-	0,8	-	0,8	0,8	0,8	-	-	-	-	4,50	37,50
Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Papua	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	4,17
Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Rerata	0,24	0,19	0,19	0,31	0,15	0,26	0,34	0,23	0,07	0,1	0,24	0,18	2,478	20,65

Sumber: Data primer diolah, 2021

Tabel 3 menginformasikan tentang indeks TPAD Tahun 2018, dari tabel tersebut dapat disampaikan bahwa indeks TPAD tertinggi diraih oleh Pemprov Sumatera Barat. Sementara itu, Pemprov Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Artinya, terdapat beberapa pemerintah daerah yang tidak mempublikasikan informasi pengelolaan anggaran daerah pada website mereka. Lebih dari itu, berdasarkan nilai rata-rata indeks TPAD sebesar 22,67 persen, mengindikasikan bahwa sebagian besar pemerintah daerah tingkat TPAD masih termasuk dalam kualifikasi sangat tidak transparan (Adiloglu & Vuran, 2012).

Tabel 3 juga memperlihatkan bahwa pada tahun 2018, indikator TPAD yang paling banyak dipenuhi, yaitu informasi Peraturan Daerah tentang APBD dan informasi tentang LKPD audit. Sementara itu, indikator TPAD yang paling sedikit dipenuhi adalah informasi tentang LRA-PPKD dan LRA-SKPD. Artinya, bahwa informasi pengelolaan anggaran daerah yang berupa LRA-PPKD dan LRA-SKPD, merupakan informasi pengelolaan anggaran daerah yang paling jarang diungkapkan oleh pemerintah daerah pada website mereka.

Tabel 3. Indeks Transparansi Pengelolaan Anggaran (TPAD) Tahun 2018

Nama Pemprov	Indikator TPAD Tahun 2018												Total	Indeks
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Aceh	0,5	-	1,0	1,0	-	-	0,5	-	0,5	-	1,0	-	4,50	37,50
Sumatera Utara	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,25	2,08
Sumatera Barat	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0	10,50	87,50
Riau	1,0	1,0	0,8	0,8	-	-	1,0	1,0	0,5	1,0	0,8	0,8	8,50	70,83
Jambi	0,8	-	-	0,5	-	-	0,8	-	-	-	0,5	-	2,50	20,83
Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	2,00	16,67
Bengkulu	-	-	-	-	-	0,5	0,8	-	1,0	-	-	0,8	3,00	25,00
Lampung	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,50	4,17
Bangka Belitung	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	0,75	6,25
Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Banten	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0	0,8	-	-	-	-	0,8	0,8	6,50	54,17
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	1,0	-	1,75	14,58
Jawa Barat	-	-	0,8	1,0	0,5	0,8	1,0	1,0	-	-	1,0	0,8	6,75	56,25
Jawa Tengah	0,8	0,8	1,0	1,0	-	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	0,8	9,50	79,17
DI Yogyakarta	-	-	-	0,8	-	0,8	-	-	-	-	-	-	1,50	12,50
Jawa Timur	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,8	6,00	50,00
Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,00	8,33
Kalimantan Tengah	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-	-	-	6,00	50,00
Kalimantan Selatan	0,8	0,8	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-	-	-	5,75	47,92
Kalimantan Timur	0,8	0,8	-	0,8	-	-	1,0	1,0	-	-	0,8	-	5,00	41,67
Kalimantan Utara	0,8	-	-	0,5	0,5	0,5	-	-	0,8	-	0,5	0,5	4,00	33,33
Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Bali	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	6,25
Nusa Tenggara Barat	-	-	0,5	-	0,5	0,8	-	-	0,3	0,5	-	-	2,50	20,83
Nusa Tenggara Timur	0,8	0,8	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25	18,75
Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Papua	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	6,25
Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Rerata	0,26	0,22	0,22	0,35	0,17	0,26	0,27	0,19	0,15	0,11	0,31	0,21	2,72	22,67

Sumber: Data primer diolah, 2021

Tabel 4 menunjukkan indeks TPAD Tahun 2019, dari tabel tersebut dapat diterangkan bahwa indeks TPAD teratas diduduki oleh Pemprov Jawa Tengah dan Pemprov Kalimantan Selatan. Kemudian, indeks TPAD terbawah ditempati oleh Pemprov Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, Maluku Utara, Gorontalo, dan Papua Barat. Artinya, terdapat beberapa pemerintah daerah sama sekali tidak mempublikasikan informasi pengelolaan anggaran daerah tahun 2019 pada website mereka. Selain itu, secara

rata-rata nilai indeks TPAD sebesar 29,96 persen, artinya tingkat TPAD pemerintah daerah pada tahun 2019 masih tergolong sangat tidak transparan (Adiloglu & Vuran, 2012).

Tabel 4 juga menggambarkan bahwa pada tahun 2019 indikator TPAD paling banyak dipenuhi oleh pemerintah daerah pada website mereka adalah informasi Perda tentang APBD dan informasi tentang Ringkasan DPA-SKPD. Sementara itu, indikator TPAD yang paling sedikit dipenuhi pada website pemerintah daerah adalah informasi Raperda tentang Perubahan APBD dan LRA-PPKD. Artinya, pada tahun 2019 hanya beberapa pemerintah daerah yang mempublikasikan informasi pengelolaan anggaran daerah berupa Raperda tentang Perubahan APBD dan LRA-PPKD pada website mereka.

Tabel 4. Indeks Transparansi Pengelolaan Anggaran (TPAD) Tahun 2019

Nama Pemprov	Indikator TPAD Tahun 2019												Total	Indeks
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Aceh	0,5	-	-	1,0	-	1,0	-	0,8	0,5	-	1,0	-	4,75	39,58
Sumatera Utara	-	-	-	-	-	0,3	0,8	-	-	-	-	-	1,00	8,33
Sumatera Barat	0,8	0,8	1,0	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	9,50	79,17
Riau	1,0	1,0	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	0,5	0,8	0,8	0,8	10,00	83,33
Jambi	1,0	-	-	0,5	-	-	1,0	-	-	-	0,5	-	3,00	25,00
Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Bengkulu	-	-	-	0,8	-	-	1,0	0,8	1,0	1,0	-	-	4,50	37,50
Lampung	-	-	-	0,5	-	0,5	-	-	-	-	-	-	1,00	8,33
Bangka Belitung	-	-	-	-	-	1,0	0,8	-	-	-	-	-	1,75	14,58
Kepulauan Riau	-	-	-	0,5	-	0,8	-	-	0,8	-	-	-	2,00	16,67
Banten	0,8	0,8	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	5,50	45,83
DKI Jakarta	-	-	-	0,8	-	0,8	0,8	-	-	-	1,0	-	3,25	27,08
Jawa Barat	-	-	-	0,8	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0	-	3,75	31,25
Jawa Tengah	0,8	0,8	0,8	1,0	0,8	1,0	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	10,50	87,50
DI Yogyakarta	-	-	-	0,8	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	1,75	14,58
Jawa Timur	0,5	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,8	7,00	58,33
Kalimantan Barat	1,0	-	-	0,5	-	-	1,0	-	-	-	1,0	-	3,50	29,17
Kalimantan Tengah	0,8	-	0,8	0,8	0,8	0,8	-	0,5	-	-	-	-	4,25	35,42
Kalimantan Selatan	1,0	1,0	0,3	1,0	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,50	87,50
Kalimantan Timur	0,8	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	0,8	-	2,50	20,83
Kalimantan Utara	0,8	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	9,00	75,00
Sulawesi Utara	-	0,5	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,5	1,50	12,50
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Sulawesi Barat	0,8	-	-	0,8	-	-	0,8	-	-	-	-	-	2,25	18,75
Bali	0,8	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,8	0,8	-	-	1,0	1,0	7,00	58,33
Nusa Tenggara Barat	0,8	-	0,8	0,8	0,8	0,5	1,0	1,0	0,8	-	1,0	-	7,25	60,42
Nusa Tenggara Timur	0,8	0,8	-	-	-	0,8	0,8	0,8	-	-	-	-	3,75	31,25
Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Papua	-	-	-	0,8	-	0,8	-	-	-	-	-	-	1,50	12,50
Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Rerata	0,37	0,22	0,21	0,47	0,18	0,38	0,45	0,3	0,23	0,18	0,38	0,23	3,596	29,96

Sumber: Data primer diolah, 2021

Kemudian, Tabel 5 menyampaikan gambaran tentang indeks TPAD Tahun 2020, berdasarkan pada tabel tersebut, ditemukan bahwa indeks TPAD yang berada pada posisi paling atas adalah Pemprov Riau. Sementara itu, indeks TPAD yang berada pada posisi paling bawah, yaitu Pemprov Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Bangka Belitung, Gorontalo, dan Papua Barat. Artinya, masih banyak pemerintah daerah

yang tidak mempublikasikan informasi pengelolaan anggaran daerah tahun 2020 pada website mereka. Lebih dari itu, berdasarkan nilai rata-rata indeks TPAD sebesar 28,55 persen, artinya secara keseluruhan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran daerah tergolong dalam kualifikasi sangat tidak transparan (Adiloglu & Vuran, 2012).

Selanjutnya, tabel 5 pun memperlihatkan indikator TPAD yang lebih banyak dipenuhi oleh pemerintah daerah pada tahun 2020 adalah informasi Peraturan Daerah tentang APBD. Sementara itu, indikator TPAD yang paling kurang dipenuhi oleh pemerintah daerah adalah informasi tentang RKA-PPKD dan informasi tentang LRA-SKPD dan LRA-PPKD. Intinya, mayoritas pemerintah daerah pada tahun 2020 belum menyajikan informasi pengelolaan anggaran daerah yang memuat tentang RKA-PPKD, begitupula informasi tentang LRA-SKPD dan LRA-PPKD pada website mereka.

Tabel 5. Indeks Transparansi Pengelolaan Anggaran (TPAD) Tahun 2020

Nama Pemprov	Indikator TPAD Tahun 2020												Total	Indeks
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Aceh	0,8	-	-	1,0	-	0,8	-	-	-	-	-	-	2,50	20,83
Sumatera Utara	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	2,08
Sumatera Barat	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0	10,25	85,42
Riau	1,0	1,0	0,8	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	0,8	0,8	1,0	1,0	11,00	91,67
Jambi	1,0	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,8	0,8	0,8	-	0,5	0,8	7,25	60,42
Sumatera Selatan	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,8	-	1,25	10,42
Bengkulu	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	1,0	-	-	3,00	25,00
Lampung	-	-	-	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	1,00	8,33
Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Kepulauan Riau	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	2,75	22,92
Banten	0,8	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	1,0	1,0	3,75	31,25
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	4,00	33,33
Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Jawa Tengah	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	0,8	-	8,00	66,67
DI Yogyakarta	-	-	-	0,8	-	0,8	-	-	0,8	0,8	-	-	3,00	25,00
Jawa Timur	0,5	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,8	7,00	58,33
Kalimantan Barat	-	-	1,0	0,8	-	-	-	-	-	-	0,8	1,0	3,50	29,17
Kalimantan Tengah	-	-	1,0	0,8	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-	3,75	31,25
Kalimantan Selatan	0,8	-	-	1,0	-	1,0	1,0	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	7,75	64,58
Kalimantan Timur	1,0	-	-	-	-	0,5	1,0	-	-	-	1,0	-	3,50	29,17
Kalimantan Utara	0,8	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	8,50	70,83
Sulawesi Utara	0,5	-	-	0,8	1,0	0,5	0,8	-	-	-	0,5	-	4,00	33,33
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	1,00	8,33
Sulawesi Barat	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	0,75	6,25
Bali	0,8	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	-	0,8	-	-	-	-	4,25	35,42
Nusa Tenggara Barat	1,0	-	0,8	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0	-	-	1,0	1,0	8,00	66,67
Nusa Tenggara Timur	0,8	-	-	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-	3,75	31,25
Maluku	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	1,25	10,42
Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Papua	-	-	-	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	-	1,50	12,50
Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Rerata	0,32	0,15	0,22	0,47	0,26	0,33	0,32	0,32	0,18	0,18	0,37	0,31	3,426	28,55

Sumber: Data primer diolah, 2021

Selanjutnya, Tabel 6 menunjukkan perkembangan indeks TPAD Tahun 2016 – 2020. Melalui tabel itu, diketahui bahwa pemerintah daerah yang memperoleh nilai rata-rata

indeks TPAD tertinggi selama lima tahun adalah Pemprov Sumatera Barat. Sementara itu, Pemprov Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua Barat selama lima tahun berturut-turut tidak mempublikasikan informasi pengelolaan anggaran daerah pada website mereka. Selain itu, informasi dari tabel tersebut juga mengindikasikan bahwa secara rata-rata indeks TPAD pemerintah daerah terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata indeks TPAD selama lima tahun terakhir sebesar 24,24 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa tingkat TPAD masih termasuk dalam kualifikasi sangat tidak transparan (Adiloglu & Vuran, 2012).

Tabel 6. Perkembangan Indeks Transparansi Pengelolaan Anggaran (TPAD)

Nama Pemprov	Tahun					Rerata
	2016	2017	2018	2019	2020	
Aceh	20,83	33,33	37,50	41,67	25,00	31,67
Sumatera Utara	0,00	0,00	2,08	10,42	2,08	2,92
Sumatera Barat	50,00	50,00	75,00	58,33	70,83	60,83
Riau	75,00	75,00	70,83	83,33	95,83	80,00
Jambi	25,00	25,00	16,67	25,00	50,00	28,33
Sumatera Selatan	4,17	12,50	16,67	0,00	8,33	8,33
Bengkulu	0,00	0,00	20,83	41,67	25,00	17,50
Lampung	12,50	4,17	4,17	8,33	8,33	7,50
Bangka Belitung	25,00	16,67	4,17	16,67	0,00	12,50
Kepulauan Riau	0,00	0,00	0,00	16,67	25,00	8,33
Banten	0,00	4,17	41,67	41,67	29,17	23,33
DKI Jakarta	8,33	20,83	16,67	33,33	33,33	22,50
Jawa Barat	54,17	50,00	58,33	33,33	0,00	39,17
Jawa Tengah	37,50	41,67	66,67	75,00	58,33	55,83
DI Yogyakarta	0,00	0,00	8,33	16,67	16,67	8,33
Jawa Timur	56,25	47,92	35,42	52,08	52,08	48,75
Kalimantan Barat	25,00	16,67	8,33	29,17	33,33	22,50
Kalimantan Tengah	0,00	20,83	33,33	25,00	33,33	22,50
Kalimantan Selatan	45,83	70,83	33,33	83,33	54,17	57,50
Kalimantan Timur	66,67	50,00	37,50	16,67	29,17	40,00
Kalimantan Utara	0,00	6,25	29,17	66,67	58,33	32,08
Sulawesi Utara	0,00	0,00	0,00	10,42	31,25	8,33
Gorontalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sulawesi Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sulawesi Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sulawesi Tenggara	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	1,67
Sulawesi Barat	0,00	0,00	0,00	20,83	8,33	5,83
Bali	0,00	0,00	4,17	50,00	29,17	16,67
Nusa Tenggara Barat	12,50	29,17	22,92	70,83	75,00	42,08
Nusa Tenggara Timur	25,00	25,00	12,50	20,83	29,17	22,50
Maluku	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	1,25
Maluku Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Papua	16,67	4,17	8,33	16,67	16,67	12,50
Papua Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rerata	19,36	20,65	22,67	29,96	28,55	24,24

Sumber: Data primer diolah, 2021

Merujuk pada Gambar 1, dapat dijelaskan tingkat kualifikasi TPAD berdasarkan kategori keterbukaan anggaran yang ditetapkan oleh IBP (2019) bahwa Pemprov Sumatera Barat sebagai satu-satunya pemerintah daerah yang tergolong dalam kriteria ekstensif. Terdapat tiga pemerintah daerah yang termuat dalam kelompok substansial, yaitu

Pemprov Riau, Kalimantan Selatan, dan Jawa Tengah. Kemudian, Pemprov Jawa Timur dan Kalimantan Timur terhitung dalam kualifikasi terbatas. Terdapat 10 pemerintah daerah termasuk dalam kualifikasi minimal, yaitu Pemprov Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Jambi, Aceh, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Banten, Kalimantan Barat, dan DKI Jakarta. Lebihnya, sebanyak 18 pemerintah daerah terbilang dalam urutan sedikit, yaitu pemprov Bali, Bengkulu, Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Papua, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Sulawesi Barat, Sumatera Utara, Maluku, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Gorontalo, Papua Barat. Makenya, sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih termuat dalam derajat keterbukaan informasi yang tidak cukup (*insufficient*) (IBP, 2019).

Gambar 1. Indeks Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD)

Sederhananya, temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Alwahidi and Darwanis (2019); Nuryani and Firmansyah (2020); Adriana and Ritonga (2018); Syamsul and Ritonga (2017); Syamsul (2020) yang menginformasikan bahwa rata-rata tingkat

TPAD di Indonesia masih sangat rendah, kurang dari 50,00 persen. Artinya, pengelolaan anggaran daerah masih sangat tidak transparan. Selain itu, temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap regulasi yang ada. Khususnya, regulasi yang mengatur tentang keharusan pemerintah daerah mempublikasi informasi mutakhir tentang pengelolaan anggaran daerah pada website pemerintah daerah (Syamsul, 2020). Bahkan, temuan ini juga menginformasikan bahwa masih terdapat beberapa pemerintah daerah yang belum menyadari pentingnya atau belum maksimal dalam memanfaatkan website pemerintah daerah sebagai media dalam mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah (Agustin, 2014; Putra, et.al., 2018). Padahal, e-government yang berbentuk website pemerintah daerah adalah media yang lebih efisien dan efektif dalam pengungkapan informasi publik.

Tabel 7. Perbandingan Indeks Transparansi Pengelolaan Anggaran (TPAD)
Tanpa Kriteria Kelengkapan dan Dengan Kriteria Kelengkapan

Peringkat	Nama Pemprov	Tanpa Kelengkapan	Nama Pemprov	Dengan Kelengkapan
1	Riau	80,00	Sumatera Barat	80,42
2	Sumatera Barat	60,83	Riau	79,17
3	Kalimantan Selatan	57,50	Kalimantan Selatan	70,42
4	Jawa Tengah	55,83	Jawa Tengah	65,42
5	Jawa Timur	48,75	Jawa Timur	57,08
6	Nusa Tenggara Barat	42,08	Kalimantan Timur	42,50
7	Kalimantan Timur	40,00	Nusa Tenggara Barat	38,33
8	Jawa Barat	39,17	Jawa Barat	37,50
9	Kalimantan Utara	32,08	Kalimantan Utara	37,08
10	Aceh	31,67	Jambi	34,58
11	Jambi	28,33	Aceh	33,33
12	Banten	23,33	Nusa Tenggara Timur	30,42
13	Nusa Tenggara Timur	22,50	Kalimantan Tengah	29,58
14	Kalimantan Barat	22,50	Banten	27,50
15	DKI Jakarta	22,50	Kalimantan Barat	21,25
16	Kalimantan Tengah	22,50	DKI Jakarta	20,42
17	Bengkulu	17,50	Bali	20,00
18	Bali	16,67	Bengkulu	17,50
19	Papua	12,50	Bangka Belitung	16,67
20	Bangka Belitung	12,50	DI Yogyakarta	10,42
21	Sulawesi Utara	8,33	Papua	9,58
22	Sumatera Selatan	8,33	Sumatera Selatan	9,17
23	DI Yogyakarta	8,33	Sulawesi Utara	9,17
24	Kepulauan Riau	8,33	Kepulauan Riau	7,92
25	Lampung	7,50	Lampung	7,50
26	Sulawesi Barat	5,83	Sulawesi Barat	5,00
27	Sumatera Utara	2,92	Sumatera Utara	2,50
28	Sulawesi Tenggara	1,67	Maluku	2,08
29	Maluku	1,25	Sulawesi Tenggara	1,67
30	Sulawesi Tengah	0,00	Sulawesi Tengah	0,00
31	Sulawesi Selatan	0,00	Sulawesi Selatan	0,00
32	Maluku Utara	0,00	Maluku Utara	0,00
33	Gorontalo	0,00	Gorontalo	0,00
34	Papua Barat	0,00	Papua Barat	0,00
	Rata-rata	21,80	Rata-rata	24,24

Sumber: Data primer diolah, 2021

Indeks TPAD pada penelitian ini dinilai berdasarkan rekomendasi dari (Syamsul, 2020), yaitu dengan menambahkan satu kriteria informasi yaitu kelengkapan informasi yang dipublikasikan. Pada tabel 7 terlihat perbedaan antara indeks TPAD yang tidak menggunakan kriteria kelengkapan dan dengan kriteria kelengkapan informasi. Dari tabel tersebut terlihat bahwa indeks TPAD tertinggi tanpa menggunakan kriteria kelengkapan informasi adalah sebesar 80,00 persen diraih oleh Pemprov Riau. Sementara itu, dengan menggunakan kriteria kelengkapan informasi, diperoleh nilai indeks TPAD tertinggi sebesar 80,42 persen diduduki oleh Pemprov Sumatera Barat. Selain itu, secara rata-rata indeks TPAD tanpa kriteria kelengkapan informasi sebesar 21,80 persen, kemudian nilai

rata-rata indeks TPAD dengan menggunakan kriteria kelengkapan informasi sebesar 24,24 persen. Maknanya, terdapat perbedaan antara nilai indeks TPAD tanpa menggunakan kriteria kelengkapan informasi dan dengan menetapkan kriteria kelengkapan informasi dalam menilai indikator TPAD. Oleh karena itu, penelitian ini menguatkan argumentasi dari Syamsul (2020) bahwa memasukkan kriteria kelengkapan dalam menilai indikator TPAD itu penting untuk dilakukan. Tujuannya adalah untuk memastikan kebermanfaatan sebuah informasi yang disajikan oleh pemerintah daerah pada website mereka. Artinya, percuma tersedia, dapat diakses, disajikan tepat waktu, tetapi tidak lengkap. Singkatnya, apabila informasi yang disajikan itu tidak lengkap tentu tidak dapat dijadikan rujukan dalam penetapan kebijakan, sebutan lainnya informasi yang tidak lengkap dapat menyesatkan para pengambil keputusan

SIMPULAN

Penelitian ini menginformasikan bahwa peringkat tertinggi indeks TPAD diraih oleh Pemprov Sumatera Barat, diikuti oleh Pemprov Riau sebagai peringkat kedua, dan Pemprov Kalimantan Selatan sebagai peringkat ketiga. Kemudian, terdapat lima pemerintah daerah yang tidak mempublikasikan satupun indikator TPAD pada website mereka, yaitu Pemprov Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua Barat. Singkatnya, secara keseluruhan tingkat TPAD masih tergolong sangat tidak transparan atau dengan kata lain tingkat keterbukaan anggaran pemerintah daerah masih termasuk dalam kualifikasi tidak cukup (*insufficient*). Meskipun demikian, penelitian ini juga berhasil menginformasikan bahwa indeks TPAD terus mengalami peningkatan secara positif dari tahun-tahun sebelumnya. Lebih dari itu, penelitian ini juga berhasil membuktikan bahwa dengan menggunakan kriteria kelengkapan dalam menilai indeks TPAD yang disajikan melalui website pemerintah daerah menjadikan pengukuran lebih akurat.

Penelitian ini memiliki kelemahan dalam menilai kriteria ketepatan waktu informasi. Keterbatasan ini terjadi karena tidak semua pemerintah daerah menuliskan waktu pengungkapan informasi pengelolaan anggaran daerah pada website mereka. Begitupula pada file dokumen yang dipublikasikan, sebagian pemerintah daerah tidak mengaktifkan tanggal pembuatan dan pengeditan terakhir, sehingga sulit untuk mengidentifikasi tanggal unggah dari sebuah dokumen. Dengan demikian, terdapat beberapa file yang dinyatakan tidak tepat waktu karena tidak diketahui kapan file tersebut disebarluaskan. Selain itu, pada saat pengambilan data terdapat beberapa link yang tidak bisa diakses, karena dalam masa perbaikan (*maintenance*) sehingga informasi pengelolaan anggaran daerah pada link tersebut tidak ditemukan. Penelitian selanjutnya, dapat mengeksplorasi faktor-faktor penentu utama TPAD pada website pemerintah daerah melalui wawancara mendalam (*deep interview*), sehingga dapat diketahui lebih dalam faktor pendukung dan penghambat publikasi melalui internet.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi Republik Indonesia sebagai penyandang dana penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiloglu & Vuran. (2012). The Relationship Between The Financial Ratios And Transparency Levels Of Financial Information Disclosures Within The Scope Of Corporate Governance : Evidence From Turkey. In *The Journal of Applied Business Research* (Vol. 28, Issue 4, pp. 543–554).
- Adriana, A., & Ritonga, I. T. (2018). Analysis of Local Financial Management Transparency Based on Websites on Local Government in Java. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 10(1), 13–26.

- <https://doi.org/10.15294/jda.v10i1.12558>
- Agustin, H. (2014). Publikasi Dokumen Pengelolaan Anggaran pada Website Pemkab / Pemkot di Propinsi Sumatera Barat. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI)*, 7–12.
- Alwahidi, M. R., & Darwanis, D. (2019). Pengukuran Transparansi Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(1), 153. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i1.10806>
- Esteves de Araujo, J. F. F., & Tejedo-Romero, F. (2016). *Local government transparency index: determinants of municipalities' rankings*. <https://doi.org/10.1108/IJEER-02-2016-0064>
- Grimmelikhuijsen, S. (2012). Linking transparency, knowledge and citizen trust in government: an experiment. *International Review of Administrative Sciences*, 78(1), 50–73. <https://doi.org/10.1177/0020852311429667>
- Habibie, N. (2018). Data 2004–2018: 104 Kepala Daerah Tersandung Korupsi, Paling Banyak di Jawa Timur. *Merdeka.Com*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-2004-2018-104-kepala-daerah-tersandung-korupsi-paling-banyak-di-jawa-timur.html>
- Hoa, T. T. T., & Garcia-Zamor, J.-C. (2017). Citizen Participation in Vietnam's Local Government: Impact on Transparency and Accountability. *Journal of Public Administration and Governance*, 7(4), 38. <https://doi.org/10.5296/jpag.v7i4.12044>
- Kaufmann, D. & Kraay, A. (2002). Growth without governance. In *The World Bank*. [https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/19206/multi0page.pdf?sequence=](https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/19206/multi0page.pdf?sequence=1)
- KPK. (2020). *Statistik Penindakan TPK Berdasarkan Wilayah*. *Www.Kpk.Go.Id*. <https://www.kpk.go.id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-wilayah>
- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants of voluntary Internet financial reporting by local government authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24(2), 101–121. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2004.12.006>
- Meijer, A. (2013). *Understanding the Complex Dynamics of Transparency*. 73, 429–439. <https://doi.org/10.1111/puar.12032>
- Meijer, A. J., Curtin, D., & Hillebrandt, M. (2012). Open government: Connecting vision and voice. *International Review of Administrative Sciences*, 78(1), 10–29. <https://doi.org/10.1177/0020852311429533>
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, F. (2019, November). 22 Dari 34 Provinsi Kepada Daerahnya Terjerat Korupsi. *Telisik.Id*. <https://telisik.id/news/22-dari-34-provinsi-kepala-daerahnya-terjerat-korupsi>
- Nuryani, & Firmansyah, A. (2020). Determinants of Transparency in Financial Management on Local Government Websites: Evidence from Indonesia. *Humanities and Social Sciences Letters*, 8(2), 145–155. <https://doi.org/10.18488/journal.73.2020.82.145.155>
- Partnership, I. B. (2019). Open Budget Survey. In *International Budget Partnership* (pp. 1–92). <https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/open-budget-survey-report-2019.pdf>
- Puron-Cid, G., Reddick, C. G., & Ganapati, S. (2019). Public value of online financial transparency: Financial sustainability and corruption of public officials in the US state governments. *International Journal of Public Sector Management*, 32(5), 511–533. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-03-2018-0073>
- Pusparisa, Y. (2019). 114 Kepala Daerah Terjerat KPK, Paling Banyak Kasus Suap. *Katadata.Co.Id*. <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a50d877ae4/selama-2004-2019-ada-144-kepala-daerah-terjerat-kasus-korupsi-di-kpk>
- Putra, Rediyanto; Ardhiarisca Oryza; Wijayanti Rahma Rina; Pratiwi, B. Y. (2018). *Evaluasi perkembangan dan transparansi laporan keuangan e- government pemerintah daerah di indonesia. 2018*(Sentika),.
- Republik Indonesia. (2010a). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2010b). *Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2012). *Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.52/1797/37/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2015). *Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi dan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*. Sekretariat Negara.
- Ritonga, I. T., & Syamsul. (2016). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia : berbasis website. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 20(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art4>

- Styles, A. K., & Tennyson, M. (2007). The accessibility of financial reporting of u.s. municipalities on the internet. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 19(1), 56–92. <https://doi.org/10.1179/str.2007.54.4.006>
- Syamsul. (2020). POTRET TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (TPKD) DI INDONESIA. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 185–204. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7105>
- Syamsul, S., & Ritonga, I. T. (2017). Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Daerah Terhadaptransparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Bukti Empiris Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 21(3), 448. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i3.251>
- Wei Wu, Liang Ma, and W. Y. (2017). *Government Transparency and Perceived Social Equity: Assessing the Moderat ing Effect of Cit izen Trust in China*. <http://hdl.handle.net/10220/44112>

Lampiran 1. Indikator Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD)

No.	Indikator TPAD	Tersedia	Aksesibilitas	Tepat Waktu	Lengkap
1	Ringkasan RKA-SKPD	Ada	Dapat diunduh	31 November (tahun berlalu)	Seluruh SKPD (OPD)
2	Ringkasan RKA-PPKD	Ada	Dapat diunduh	31 November (tahun berlalu)	PPKD
3	Rancangan Perda APBD	Ada	Dapat diunduh	22 Juni	Batang tubuh, dan lampirannya
4	Perda APBD	Ada	Dapat diunduh	22 Juni	Batang tubuh, dan lampirannya
5	Rancangan Perda Perubahan APBD	Ada	Dapat diunduh	31 November	Batang tubuh, dan lampirannya
6	Perda Perubahan APBD	Ada	Dapat diunduh	31 November	Batang tubuh, dan lampirannya
7	Ringkasan DPA-SKPD	Ada	Dapat diunduh	22 Juni	Seluruh SKPD (OPD)
8	Ringkasan DPA-PPKD	Ada	Dapat diunduh	22 Juni	PPKD
9	LRA-SKPD	Ada	Dapat diunduh	31 Agustus	Seluruh SKPD (OPD)
10	LRA-PPKD	Ada	Dapat diunduh	31 Agustus	PPKD
11	LKPD audit	Ada	Dapat diunduh	31 Agustus	LO, Neraca, Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, CaLK, LRA, Laporan Perubahan SAL
12	Opini atas LKDP	Ada	Dapat diunduh	31 Agustus	Lembaran Opini

Sumber: Inpres RI Nomor 7 Tahun 2015